

LAPORAN AKHIR  
RENCANA KEGIATAN TINGKAT MANAJEMEN  
(RKTM)

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PERLENGKAPAN



Drs. Ganjar Jayanto

BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI  
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian  
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian  
Kementerian Pertanian  
2017

LAPORAN AKHIR  
RENCANA KEGIATAN TINGKAT MANAJEMEN  
(RKTM)

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PERLENGKAPAN

Tahun Anggaran 2017

Oleh:

Drs. Ganjar Jayanto  
Muhammad Nur Imansyah, S.Kom  
Epen Supendi

BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI  
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian  
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian  
Kementerian Pertanian  
2017

## LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul RKTM : Manajemen Kepegawaian dan Rumah Tangga
2. Unit Kerja : Balai Penelitian Agroklimat Dan Hidrologi
3. Alamat Unit Kerja : Kampus Penelitian Pertanian  
Jalan Tentara Pelajar No. 1A Cimanggu Bogor 16111
4. Sumber Dana : DIPA Satuan Kerja Balai Penelitian Agroklimat dan  
Hidrologi TA 2017
5. Status Penelitian (L/B) : Lanjutan
6. Penanggung Jawab :
  - a. Nama : Drs. Ganjar Jayanto
  - b. Pangkat/ Golongan : Penata TK. I/IIIId
  - c. Jabatan :
    - c1. Struktural : Ka. Sub Bag Tata Usaha
    - c2. Fungsional : Teknisi Litkayasa Penyelia
7. Lokasi : Nasional
8. Agroekosistem :
9. Tahun Mulai : 2017
10. Tahun Selesai : 2017
11. Output Tahunan :
  - a. Laporan realisasi penggunaan anggaran bulanan, triwulanan, tengah tahunan dan tahunan dari masing-masing unit kegiatan.
  - b. Laporan keuangan dan barang milik negara berdasar Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah yang berkualitas menuju prinsip pemerintahan yang baik, sehingga dihasilkan laporan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (unqualified).
12. Output Akhir : Laporan Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan  
Perlengkapan
13. Biaya : Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

Koordinator Program dan Evaluasi

Penanggung Jawab RKTM

Dr. Ir. Popi Rejekiningrum, MS  
NIP. 19641129 199003 2 002

Drs. Ganjar Jayanto  
NIP. 19610121 198203 1 001

Mengetahui :  
Kepala Balai Besar Litbang  
Sumberdaya Lahan Pertanian,

Kepala Balai Penelitian  
Agroklimat dan Hidrologi,

Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr.  
NIP. 19640623 198903 1 002

Dr. Ir. Harmanto, M.Eng  
NIP. 19671123 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

Satuan Kerja (Satker) Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi melaksanakan kegiatan yang bersifat administratif pendukung kegiatan Penelitian khususnya yaitu layanan Manajemen Sumberdaya Lahan Pertanian. Dalam layanan Manajemen Sumberdaya Lahan terdiri dari 2 kegiatan masing-masing adalah pengelolaan keuangan dan perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian dan Manajemen Kepegawaian Kelembagaan Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Kegiatan ini adalah kegiatan pendukung dengan judul Pengelolaan keuangan dan perlengkapan sumberdaya Lahan Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Terinci Manajemen (RKTm).

Kegiatan Pengelolaan keuangan dan perlengkapan terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu 1). Pengelolaan Keuangan yang laporannya dituangkan dalam Aplikasi Sistem Akuntansi berbasis AkruaI (SAIBA) dan 2). Pengelolaan Aset Tetap dan Persediaan yang ditampung dalam Aplikasi Pelaporan (SIMAK BMN).

Kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah penyelenggaraan kegiatan administrasi satuan kerja dan operasional perkantoran serta mendukung proses pengambilan kebijakan berkenaan dengan keberlangsungan tatanan kinerja Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi. Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada segenap pelaksana kegiatan yang telah berpartisipasi aktif. Saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun berjalan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Desember2017

Kepala Balai Penelitian  
Agroklimat dan Hidrologi,

Dr. Ir. Harmanto, MEng  
NIP. 196711231993031001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR ISTILAH .....	viii
ABSTRAK.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Luaran yang diharapkan .....	2
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	3
III. BAHAN DAN METODE.....	4
3.1. Bahan.....	4
3.1.1. Bahan Dokumen Sumber .....	4
3.1.2. Bahan Penunjang.....	4
3.2. Metode .....	5
3.2.1. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan.....	5
3.2.1.1. Pengelolaan Administrasi Keuangan .....	5
3.2.1.2. SAIBA dan SIMAK-BMN.....	6
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	8
4.1. Hasil .....	8
4.1.1. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan.....	8
4.1.1.1. Pengelolaan Administrasi Keuangan .....	8
4.1.1.2. SAIBA dan SIMAK-BMN.....	8
4.2. Pembahasan.....	8
4.2.1. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan.....	8
4.2.1.1. Pengelolaan Administrasi Keuangan .....	8
4.2.1.2. SAIBA dan SIMAK-BMN.....	11
V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	17
5.1. Kesimpulan .....	17
5.2. Saran.....	17
VI. PRAKIRAAN DAMPAK HASIL KEGIATAN .....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 (SAIBA) .....	11
Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan .....	12
Tabel 3. Neraca untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 (SAIBA) ..	12
Tabel 4. Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 (SAIBA) .....	14
Tabel 5. Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 (SAIBA) .....	15
Tabel 6. Daftar Aset Tetap Lainnya Semester II TA 2017 .....	16

## DAFTAR ISTILAH

SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
UAKPA	:	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat
TA	:	Tahun Anggaran
SOP	:	Standard Operating Procedure



## ABSTRAK

Guna meningkatkan kemajuan dan menjamin akuntabilitas pelaksanaan administrasi kegiatan di Satuan Kerja Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (Balitklimat) TA 2017, maka diperlukan dukungan melalui peningkatan sistem kinerja melalui kegiatan Layanan Manajemen Sumberdaya Lahan Pertanian.

Layanan Manajemen Sumberdaya Lahan Pertanian terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu 1) Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan; 2) Pengelolaan Kepegawaian dan Rumah Tangga Litbang Sumberdaya Lahan.

Paradigma baru dalam proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Sistem anggaran berbasis kinerja ini memerlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja untuk menghindari duplikasi dalam penggunaan anggaran negara. Dengan demikian maka setiap pengguna anggaran dituntut untuk dapat mengelola anggaran secara tertib, taat aturan ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tupoksi satuan kerja yang bersangkutan.

Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) dibentuk sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Menteri Negara Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Selanjutnya Menteri Keuangan sebagai pemegang otoritas keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor: 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang dimulai pada Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Pusat. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pemerintah melalui kementerian keuangan telah mewajibkan setiap instansi pemerintah yang mendapatkan anggaran dari APBN menerapkan sistem pelaporan berbasis aplikasi yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang terintegrasi dengan Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN) yang juga berbasis teknologi Informasi secara online.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Paradigma baru dalam proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Sistem anggaran berbasis kinerja ini memerlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja untuk menghindari duplikasi dalam penggunaan anggaran negara. Oleh sebab itu setiap pengguna anggaran dituntut untuk dapat mengelola anggaran secara tertib, taat aturan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pelaksanaan tupoksi satuan kerja yang bersangkutan.

Sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan anggaran dan pelaporannya secara rutin dan berkala, maka Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi menetapkan satu unit kegiatan yang mendukung salah satu Tupoksi yaitu Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan.

Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) dibentuk sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 huruf (g) yang menyatakan Menteri Negara Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Selanjutnya Menteri Keuangan sebagai pemegang otoritas keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor: 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang dimulai pada Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Pusat yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

PMK nomor 59 tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan dan pelaporan akuntansi Barang Milik Negara mutlak menjadi kewajiban setiap pimpinan satker, hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas penggunaan dana pengadaan Barang Milik Negara.

## 1.2. Tujuan

### a. Jangka Pendek

1. Melaksanakan pengelolaan penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi secara tertib, taat aturan, efektif, ekonomis, transparan, akuntabilitas dan tepat sasaran.
2. Menyediakan informasi dan laporan keuangan dan aset barang milik negara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan yang dapat diakses secara online dan terbatas oleh Kemenkeu secara berjenjang melalui Unit kerja eselon I dan Unit Akuntansi Wilayah masing-masing kementerian .

### b. Jangka Panjang

1. Menghasilkan Sistem Administrasi penggunaan dan penyerapan anggaran Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi yang bersumber dari APBN secara taat aturan, ekonomis, efektif, efisien, dan sesuai sasaran.
2. Menyediakan informasi keuangan dan barang milik negara yang dapat diakses secara online dan terbatas oleh pemegang otoritas keuangan pemerintah yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan satker atau pemerintah pusat secara efektif dan efisien.

## 1.3. Luaran yang diharapkan

- a. Laporan realisasi penggunaan anggaran bulanan, triwulanan, tengah tahunan dan tahunan dari masing-masing unit kegiatan.
- b. Laporan keuangan dan barang milik negara berdasar Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah yang berkualitas menuju prinsip pemerintahan yang baik, sehingga dihasilkan laporan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (unqualified).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi telah melakukan pemberdayaan SIM dengan melakukan pemutakhiran data, analisis keterkaitan dan pembinaan terhadap pelaksana dan pemakai SIM. Kemajuan Teknologi Informasi yang sangat pesat menghendaki sistem pelaporan keuangan dan sistem pelaporan Barang Milik Negara diwajibkan untuk setiap Satuan Kerja (Satker) harus menggunakan aplikasi SIM yang sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Pemutakhiran data terutama pelaporan Keuangan dan anggaran dan Informasi dinamika Barang Milik Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan. Anggaran negara sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan mata uang (rupiah) sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Pengembangan Sistem Akuntansi Intansi di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dimulai pada tahun anggaran 2005 dan programnya terus disempurnakan. Secara tersurat, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di satu pihak, serta Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang di pihak yang lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan akuntansi keuangan dimana mulai TA 2015 diterapkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA). Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dalam akuntansi pemerintahan Barang Milik Negara merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud dan aset tidak berwujud. Untuk mencapai opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian maka sistem pelaporan harus mengikuti peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh menteri keuangan selaku otoritas pengelola keuangan negara.

### III. BAHAN DAN METODE

#### 3.1. Bahan

Bahan yang diperlukan dalam kegiatan ini terdiri dari Dokumen Sumber dan bahan penunjang.

##### 3.1.1. Bahan Dokumen Sumber

##### 1. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran

- a. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA);
- b. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL);
- c. Pedoman Operasional Kegiatan (POK)
- d. Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- f. Kuitansi dan dokumen yang sah.

##### 2. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi

- a. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA);
- b. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL);
- c. Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- e. Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa;
- f. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- g. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
- h. Dokumen Aset Tetap;
- i. Dokumen Konstruksi;
- j. Bukti Kepemilikan BMN;
- k. Faktur Pembelian;
- l. Surat Keputusan Penghapusan;

##### 3.1.2. Bahan Penunjang

1. ATK;
2. Komputer.

### 3.2. Metode

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan. Beberapa kegiatan dilakukan dengan cara perekaman dokumen sumber dan dilakukan processing data dengan menggunakan software. Prosedur perekaman/entri dan prosesing data ini meliputi penerimaan dokumen, verifikasi, perekaman dan pelaporan dengan uraian sebagai berikut:

#### 3.2.1. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan

##### 3.2.1.1. Pengelolaan Administrasi Keuangan

Kegiatan pengelolaan administrasi dan pengelolaan anggaran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan baik pelaksanaan anggaran maupun yang meliputi perencanaan penggunaan anggaran dan perencanaan penerimaan negara bukan pajak.

Perencanaan penggunaan anggaran meliputi kegiatan meneliti dan mencermati pos pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam DIPA dan POK Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi selanjutnya disusun Rencana Operasional Kegiatan (ROK). Selain itu juga dilakukan persiapan dokumen-dokumen pencairan, pencatatan dan penatausahaan pelaksanaan anggaran dalam bentuk format standar sesuai ketentuan yang berlaku seperti BKU, Buku Kas, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Persekot, SPP, SPBY, SPM dan SP2D. Pencatatan dan pelaporan anggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker), yang terdiri dari SPM dan SILABI Bendahara Pengeluaran.

Perencanaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan cara menetapkan Jenis Penerimaan. Jenis penerimaan PNBP terdiri dari Penerimaan Umum dan Penerimaan Fungsional. Dengan sistem anggaran baru rencana penerimaan dan penggunaan, khususnya penerimaan fungsional sudah merupakan satu kesatuan dengan DIPA. Sehingga perencanaan penerimaan termasuk penggunaannya dituntut penatausahaan yang lebih baik. Pelaporan PNBP dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SIMPONI yang dirilis oleh Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan anggaran meliputi kegiatan pencairan anggaran dari KPPN, pencatatan dan penatausahaan pelaksanaan anggaran, pengendalian dan pembebanan anggaran sesuai output dan kelompok AKUN yang tertuang dalam DIPA dan POK Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi. Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan dengan cara menatausahakan dan mengendalikan sesuai MAP (Mata Anggaran Penerimaan) dan Jenis penerimaan PNBP.

Pelaporan terdiri dari pelaporan realisasi anggaran bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan sesuai output kegiatan dan laporan tengah tahun serta laporan akhir tahun kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran.

### 3.2.1.2. SAIBA dan SIMAK-BMN

#### 1. Kegiatan Harian/Triwulanan/Semesteran

- a. Menerima dan memverifikasi Dokumen Sumber;
- b. Merekam transaksi keuangan;
- c. Melakukan posting data untuk transaksi yang telah lengkap dan benar;
- d. Melakukan rekonsiliasi data dan atau menerima hasil rekonsiliasi data;
- e. Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Realisasi Belanja, Realisasi Pengembalian Belanja, Realisasi Pendapatan, Realisasi Pengembalian Pendapatan;
- f. Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan;
- g. Menyampaikan Laporan Keuangan ke Unit Akuntansi Wilayah/Eselon 1;
- h. Menyampaikan Laporan Keuangan ke KPPN.
- i. Membukukan data transaksi BMN ke dalam BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, Buku Barang Bersejarah, dan Buku Persediaan berdasarkan dokumen sumber;
- j. Membuat dan atau memutakhirkan KIB, DIR, dan DIL;
- k. Membuat Laporan BMN pada akhir semester;
- l. Menyampaikan data transaksi BMN ke Unit Akuntansi Keuangan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya untuk penyusunan neraca tingkat UAKPA;
- m. Menyampaikan Laporan BMN berserta ADK ke UAPPBW/UAPPB-E1, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya suatu semester;
- n. Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib.

#### 2. Kegiatan Akhir Periode Akuntansi

- a. Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Realisasi Belanja, dan Realisasi Pendapatan;
- b. Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan;
- c. Menyampaikan Laporan Keuangan ke Unit Akuntansi Wilayah/Eselon 1;
- d. Membuat Laporan Kondisi Barang (LKB);
- e. Meminta pengesahan penanggungjawab UAKPB atas LKB;
- f. Membuat Laporan BMN Tahunan berdasarkan saldo BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, dan Buku Barang Bersejarah;

- g. Meminta persetujuan penanggung jawab UAKPB atas Laporan BMN;
- h. Menyampaikan Laporan BMN Tahunan dan LKB beserta ADK ke UAPPB-W dan UAPPB-E1. Untuk UAKPB Pusatselambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya tahun anggaran.
- i. Mengarsipkan BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, salinan LKB, dan salinan Laporan BMN secara tertib;
- j. Melakukan proses back-up data dan tutup tahun.



## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil

#### 4.1.1. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan

##### 4.1.1.1. Pengelolaan Administrasi Keuangan

1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Realisasi Anggaran Bulanan s/d Desember 2017;
2. Laporan Realisasi Anggaran Tengah Tahun;

##### 4.1.1.2. SAIBA dan SIMAK-BMN

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Laporan Realisasi Pengembalian Belanja;
3. Laporan Realisasi Pendapatan;
4. Neraca;
5. Laporan Operasional;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Laporan Barang Kuasa Pengguna;
8. Laporan Persediaan.

### 4.2. Pembahasan

#### 4.2.1. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan

##### 4.2.1.1. Pengelolaan Administrasi Keuangan

###### ) Pelaksanaan Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi tahun 2017 merupakan bagian dari Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan, Kementerian Pertanian. DIPA Tahun 2017 diharapkan menghasilkan 5 (lima) output dengan nilai input semula sebesar Rp. 9.533.922.000, dan direvisi melalui penghematan menjadi Rp. 9.491.344.000,- yang terdiri dari:

#### 1800.202. Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian Tanah,Air,dan Lingkungan Pertanian

Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian Tanah, Air, dan Lingkungan Pertanian dengan nilai input sebesar Rp. 1.457.500.000, yang terdiri dari 5 (lima) sub output, yaitu:

1. Analisis Sumberdaya Iklim dan Air untuk Optimalisasi KATAM Terpadu dan Sistem Produksi Pajale Menghadapi Keragaman dan Perubahan Iklim dengan nilai input sebesar Rp. 290.000.000,-
2. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Resiko Keragaman Iklim dan Iklim Ekstrim Mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dengan nilai input sebesar Rp. 290.000.000,-
3. Model Pengelolaan Air Terpadu Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Indeks Pertanaman Menghadapi Perubahan Iklim dengan nilai input sebesar Rp. 340.000.000,-
4. Penelitian dan Pengembangan Desain Pemanfaatan Sumberdaya Air untuk Peningkatan Produktifitas Padi Gogo dengan nilai input sebesar Rp. 240.000.000,-
5. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif Pengelolaan Sumberdaya Iklim dan Air untuk Mendukung Pertanian Modern dengan nilai input sebesar Rp. 297.500.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.433.530.190 atau 98,36 %.

#### 1800.204. Diseminasi Inovasi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian

Diseminasi Inovasi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian dengan nilai input sebesar Rp. 175.000.000. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 174.910.135 atau 99,95 %.

#### 1800.951. Layanan Manajemen Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian

Output Laporan Pengelolaan Satker dengan nilai input sebesar Rp. 1.049.922.000 terdiri dari 7 (tujuh) sub output, yaitu:

1. Sub output Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran dengan nilai input sebesar Rp. 1.049.922.000 yang terdiri dari 7 (tujuh) komponen kegiatan, yaitu (A) Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan dengan nilai input sebesar Rp. 75.000.000, (B) Pengelolaan Kepegawaian dan Rumah Tangga Litbang Sumberdaya Lahan dengan nilai input sebesar Rp. 80.000.000. (C) Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan dengan nilai input sebesar Rp.170.000.000 (D) Pelaksanaan Koordinasi dan Pendampingan UPSUS PAJALE Litbang Sumberdaya Lahan dengan nilai input sebesar Rp.200.000.000 (E) Operasional dan Pemeliharaan Laboraturium Serta Kebun Percobaan dengan nilai input sebesar Rp.299.922.000,-
2. Sub output Dukungan Program dan Pelaporan dengan nilai input sebesar Rp.225.000.000 yang terdiri dari 2 (dua) komponen kegiatan, yaitu (A) Perencanaan dan Anggaran Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian dengan nilai input sebesar Rp. 90.000.000, (B) Monitoring , Evaluasi dan SPI Sumberdaya Lahan Pertanian dengan nilai input sebesar Rp. 135.000.000.

Realisasi anggaran output ini sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.009.068.210 atau 96,11%.

#### 994. Layanan Perkantoran

Output Layanan Perkantoran dengan nilai input sebesar Rp. 6.808.922.000 terdiri dari 2 (dua) sub output, yaitu sub output Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan dengan nilai input sebesar Rp. 4.603.922.000 dan sub output Layanan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan dengan nilai input sebesar Rp. 2.205.000.000.

Realisasi anggaran output ini sampai dengan 31Desember 2017 sebesar Rp. 6.088.662.520atau 89,42%.

#### J) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Target Estimasi Penerimaan Dana PNBP Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologii tahun 2017 sebesar Rp. 51.500.000,00.Realisasi penerimaan PNBP sampai dengan 31Desember 2017 sebesar Rp. 59.834.250atau 116,18%.

#### 4.2.1.2. SAIBA dan SIMAK-BMN

##### Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 55.834.250 atau mencapai 116,18% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 51.500.00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 8.704.197.208 atau mencapai 91,73persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.9.491.344.000,-

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir 31Desember 2017 dan 2016 (SAIBA)

Uraian	2017		% thd Anggaran	2016
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	51.500.000	55.834.250	116,18	140.348.376
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>51.500.000</b>	<b>55.834.250</b>	<b>116,18</b>	<b>140.348.376</b>
<b>Belanja Negara</b>				
Rupiah Murni	9.533.922.000	8.704.197.208	91,71	14.391.772.029
Belanja Pegawai	4.603.922.000	3.933.913.915	85,45	4.357.206.113
Belanja Barang	4.930.000.000	4.770.283.293	97,60	10.034.565.916
Belanja Modal	0	0	0	0
Hibah	0	0	0	0
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	0	0	0	0
Belanja Modal	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara</b>	<b>9.533.922.000</b>	<b>8.704.197.208</b>	<b>91,71</b>	<b>14.391.772.029</b>

#### 1. Laporan Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31Desember 2017 adalah sebesar Rp. 59.834.250 atau mencapai 116,18 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 51.500.000.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	2017		
		Estimasi	Realisasi	% Real
1.	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, & hasil cetakan lainnya	3.500.000	0	0.00
2.	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	15.000.000	0	0.00
3.	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	5.000.000	0	0.00
4.	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	0	0	0.00
5.	Pendapatan dari Jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi	28.000.000	5.800.000	8.42
6.	Pendapatan jasa lainnya	0	0	78.10
7.	Penerimaan kembali belanja Pegawai TAYL	0	6.781.400	0.00
8.	Penerimaan kembali belanja barang TAYL	0	47.252.850	0.00
	<b>Jumlah</b>	51.500.000	59.834.250	108,22

## 2. Penyusunan Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017 .

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 12.764.438.751 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 2.692.300, Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 12.749.379.680; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 12.366.771. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 12.764.438.751.

Tabel 3. Neraca untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 (SAIBA)

Uraian	31Desember 2017	31 Desember 2016
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Persediaan	2.692.300	3.372.300
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>2.692.300</b>	<b>3.372.300</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Peralatan dan Mesin	16.999.121.404	17.022.837.404
Gedung dan Bangunan	10.682.055.000	14.650.603.875
Jalan Irigasi dan Jaringan	196.362.500	187.784.500
Aset Tetap Lainnya	348.902.500	348.902.500
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(15.477.061.724)	(19.580.580.526)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>12.749.379.680</b>	<b>12.644.047.753</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		

Uraian	31Desember 2017	31 Desember 2016
Aset Tak Berwujud	128.875.000	122.575.000
Aset Lain - lain	87.216.000	
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>12.366.771</b>	<b>122.575.000</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>12.764.438.751</b>	<b>14.728.741.935</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang kepada Pihak Ketiga	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	12.764.438.751	12.668.276.126
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>12.764.438.751</b>	<b>12.668.276.126</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>12.764.438.751</b>	<b>12.668.276.126</b>

### 3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 5.800.000 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp. 10.802.900.006, sehingga terdapat surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (10.797.100.006). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 52.757.330 dan sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (10.744.342.676).

Tabel 4. Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 (SAIBA)

Uraian	31 Desember 2017	30 Desember 2016
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>		
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		
Pendapatan Perpajakan	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak	59.834.250	8.910.000
Pendapatan Hibah	0	0
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>	<b>59.834.250</b>	<b>8.910.000</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Beban Pegawai	3.933.913.915	4.357.206.113
Beban Persediaan	680.315.715	1.434.249.918
Beban Barang dan Jasa	2.256.795.858	3.556.295.066
Beban Pemeliharaan	690.313.500	800.694.340
Beban Perjalanan Dinas	1.142.261.300	4.239.952.650
Beban Barang untuk Diserahkan Masyarakat	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.099.299.718	6.626.643.073
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>10.802.900.006</b>	<b>21.015.041.160</b>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(10.797.100.006)</b>	<b>(20.996.162.110)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Surplus/ (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	52.757.330	118.078.283
Surplus/ (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	<b>52.757.330</b>	<b>118.078.283</b>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>52.757.330</b>	<b>118.078.283</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>		
Beban Luar Biasa	0	0
<b>SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT) LO</b>	<b>(10.744.342.676)</b>	<b>(20.996.162.110)</b>

#### 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 12.668.276.126 dikurangi surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (10.744.342.676) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 8.650.572.952 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp.12.764.438.751.

Tabel 5. Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 (SAIBA)

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>EKUITAS AWAL</b>	12.668.276.126	14.708.351.935
<b>SURPLUS/ (DEFISIT) - LO</b>	(10.744.342.676)	(20.878.083.827)
<b>PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN</b>	0	0
Penyesuaian nilai aset	0	0
Penyesuaian nilai persediaan	0	0
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	2.189.932.349	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	4.572.084.365
Lain-lain	0	0
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	8.650.572.952	14.265.923.653
<b>KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS</b>	96.162.625	(2.040.075.809)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>12.764.438.751</b>	<b>12.668.276.126</b>

5. Laporan Barang Kuasa Pengguna;

a. Tanah

Saldo Tanah pada Satuan Kerja Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 0,- Jumlah tersebut Rp. 0,- dikarenakan kantor Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi tidak mempunyai aset tanah, tanah yang ada/ dipakai sekarang adalah Pinjam Pakai dari Balitro.

Adapun tanah yang dipergunakan untuk Gedung dan Bangunan Perkantoran, Gedung Parkir kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (empat), Gedung Mess, Rumah Kasa, Garasi mobil, taman serta tanah lapang masih berstatus pinjam pakai dari Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik (Balitro). Tanah tersebut terletak di Jalan Tentara Pelajar Nomor 1A, Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor 16111 seluas kurang lebih 8.800 m<sup>2</sup>.

b. Peralatan dan Mesin (131311)

Saldo Peralatan dan Mesin pada Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (Balitklimat) per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 16.999.121.404. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 17.022.837.404 mutasi tambah Rp. 0.



c. Gedung dan Bangunan (131511)

Saldo Gedung dan Bangunan pada Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 10.682.055.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 10.682.055.000 dan penambahan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp.0.

d. Irigasi (131712)

Saldo Irigasi pada Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (Balitklimat) per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 44.042.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 44.042.000,- dan belum ada penambahan aset berupa irigasi.

Aset irigasi Balitklimat semuanya berupa bangunan duga muka air/ bangunan pelengkap pengaman sungai yang berada di lokasi penelitian.

e. Jaringan (131713)

Saldo Jaringan pada Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (Balitklimat) per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 152.320.500. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 152.320.500 dan penambahan aset berupa jaringan sebesar Rp. 0. Aset jaringan yang dimiliki oleh Balitklimat berupa jaringan distribusi tegangan lebih dari 20 kVA.

f. Aset Tetap Lainnya (131911)

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Satuan Kerja Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (Balitklimat) per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 348.902.500,- . Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 348.902.500,-. Tidak terdapat mutasi penambahan aset tetap lainnya.

Aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Balitklimat berupa peta/map dan buku ilmiah sebanyak 56 unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Aset Tetap Lainnya Semester II TA 2017

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga
1	Gambar Jarak Jauh	2	99.100.000
2	Peta Citra Spot	34	211.372.000
3	Peta Citra Satellite	3	9.000.000
4	Buku ilmiah populer	17	29.430.500
Jumlah			348.902.500

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

1. Software SAIBA sudah dapat dioperasikan dengan baik. Informasi sesuai format yang ada dalam software SAIBA 2017 seperti neraca tingkat satuan kerja, laporan realisasi anggaran satuan kerja, laporan realisasi anggaran belanja dan catatan atas laporan keuangan dapat disajikan dengan baik.
2. Sistem Informasi manajemen Penggunaan Anggaran yang di tuangkan dalam Software Aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN sangat membantu dalam penyusunan laporan dan terkoneksi dengan Sistem Informasi Anggaran Perbendaharaan Negara (SPAN), sehingga memudahkan Satuan Kerja memonitor pengajuan SPM dan SP2D maupun Realisasi Anggaran.

### 5.2. Saran

Untuk update Aplikasi SAIBA, BMN dan Persediaan diusahakan ketika ada update baru tidak membuat data yg sebelumnya jadi eror atau malah jadi selisih, karena sangat mengganggu ketika terjadi seperti itu.

## VI. PRAKIRAAN DAMPAK HASIL KEGIATAN

Dengan adanya program SAIBA maka akan dapat meningkatkan keakuratan dan efisiensi sistem keuangan Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Tahun Anggaran 2017. Dengan demikian dapat dilakukan pengendalian dan perencanaan yang lebih baik.

Dari laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Pemerintah yang terbaru, akan dapat diketahui realisasi anggaran sampai dengan waktu terakhir laporan keuangan dibuat. Print-out realisasi anggaran tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan mengenai rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Apabila realisasi anggaran sampai periode tertentu belum memenuhi target, berarti periode kedepan harus lebih ditingkatkan kinerjanya. Atau sebaliknya, apabila sampai pada periode tertentu realisasi anggaran yang dikeluarkan ternyata melampaui batas anggaran, maka dapat dilakukan penghematan untuk periode berikutnya. Selain itu dapat diketahui pula kinerja-kinerja mana dari tiap kegiatan yang didanai dari Satker Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi yang sudah terealisasi atau yang harus segera dilaksanakan beserta tingkat capaian sasaran.

Dengan adanya software SAIBA terbaru yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Informasi Akuntansi Kementerian Keuangan dapat mempermudah pencatatan keuangan Balai. Disamping waktu, software SAIBA ini lebih akurat sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Pertanian, 1995. Panduan Operasional Subsistem Monitoring. Sistem Informasi Manajemen, Panduan 9. Software Release 1,0. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta
- Badan Litbang Pertanian, 1998. Panduan Operasional Subsistem Program Penelitian. Sistem Informasi Manajemen, Panduan 14. Software Release 2,1. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian Jakarta.
- Badan Litbang Pertanian, 1998. Buku Petunjuk Pengoperasian Perangkat Lunak Sub sistem Keuangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 1999. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 1999-2005. Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian
- Direktorat Informasi Akuntansi, 2005. Modul Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Departemen Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017. 13. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran No. SP DIPA-018.09.2.648694/2017, tanggal 7 Desember 2016 tentang Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2017
- Pusat Data Pertanian, 1997. Sistem Pengkodean Unit Kerja Departemen Pertanian, untuk Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Proyek Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik Pertanian, Pusat Data Pertanian, Departemen Pertanian Jakarta.
- Pusgram 1998. Laporan Bulanan Pusat Penyiapan Program Penelitian. Bulan Desember 1998. Pusat penyiapan Program Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, 2005 Rencana Strategis Penelitian Tanah dan Agroklimat Tahun 2005-2011, Puslitbangtanak. Bogor.
- Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.